

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Inflasi Provinsi Bali pada triwulan II 2024 tercatat sebesar 2,71 persen (yoy), mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi inflasi triwulan I 2024 yang tercatat sebesar 3,67 persen (yoy). Angka ini juga menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Provinsi Bali berada di bawah target inflasi Nasional. Secara bulanan (month to month / m-t-m), Provinsi Bali tercatat mengalami deflasi sebesar 0,55 persen. Sementara secara year to date (y-t-d), tercatat inflasi sebesar 1,12 persen.

Secara year on year (yoy), Kota Denpasar tercatat mengalami inflasi sebesar -0,32% (mtm) atau 3,18% (yoy), kemudian Badung mengalami inflasi sebesar -0,63% (mtm) atau 2,75% (yoy), Singaraja mengalami inflasi sebesar -0,53% (mtm) atau 2,14% (yoy), dan Tabanan mengalami inflasi sebesar -1,09% (mtm) atau 1,96% (yoy). Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi y-on-y pada bulan Juni 2024 antara lain cabai rawit, beras, minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, dan parfum. Sementara itu, komoditas yang menahan laju inflasi dengan memberikan sumbangan negatif, antara lain bawang merah, tomat, sawi hijau, kol putih, dan buncis.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Harga angkutan udara meningkat karena meningkatnya permintaan sehubungan dengan periode liburan sekolah
2. Harga kopi bubuk meningkat karena meningkatnya harga kopi di tingkat internasional akibat produksi yang turun di negara produsen utama terutama Vietnam dan Brazil akibat faktor cuaca, disertai kuatnya permintaan.
3. Harga kue basah meningkat karena dampak lanjutan dari kenaikan sebagian besar harga bahan baku kue basah seperti tepung dan gula pasir yang terjadi dari minggu-minggu lalu
4. Harga cabai rawit meningkat karena pasokan belum kembali normal di pasar walau beberapa petani sudah mulai panen.
5. Harga daging babi meningkat karena pasokan terbatas di pasar yang disebabkan oleh virus African Swine Fever (ASF). Disamping itu harga pakan Babi meningkat sehingga peternak babi membatasi produksinya.
6. Harga air kemasan meningkat karena kenaikan harga dari distributor akibat kenaikan biaya produksi.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pilar 4 K	KEBIJAKAN/ PROGRAM
-----------	--------------------

<b>Keterjangkauan Harga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pemantauan harga dan pasokan komoditas strategis secara rutin</li> <li>- Pelaksanaan Operasi Pasar dan Pasar Murah secara ngrombo (bersama-sama).</li> <li>- Optimalisasi peran perumda sebagai off-taker untuk melakukan pembelian langsung produk hortikultura ke petani dan penjualan kepada pedagang pasar</li> <li>- Pelaksanaan sidak dan monitoring harga oleh TPID dan Satgas Pangan</li> <li>- Mendorong percepatan pembangunan pasar induk untuk keterjangkauan harga</li> <li>- Mengelola gerai inflasi oleh Perumda sebagai referensi harga pasar</li> </ul>
---------------------------------	---

<p><b>Ketersediaan Pasokan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan benih/bibit</li> <li>- Pemberian subsidi pupuk</li> <li>- intensifikasi penggunaan bibit unggul</li> <li>- Urban Farming: gerakan tanam cabai, bawang merah, dll (dibarengi dengan monitoring)</li> <li>- Pelaksanaan inovasi GENTA PATEN (Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen) di lingkungan perangkat daerah, sekolah dan masyarakat</li> <li>- Digital farming</li> <li>- Pengembangan pertanian organik</li> <li>- Penyuluhan, pembinaan kepada petani dan nelayan</li> <li>- Pemeliharaan waduk, embung untuk irigasi</li> <li>- Pengembangan Petani Terintegrasi Hulu-Hilir berbasis kawasan (kelembagaan Bersama Satu Pintu/KBS)</li> <li>- Penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan)</li> <li>- Bantuan sarana penangkapan ikan berupa motor tempel dan jaring kepada kelompok nelayan melalui dana hibah</li> <li>- Fasilitasi berupa bantuan mobil berpendingin kepada kelompok pengolah pemasar/koperasi perikanan melalui dana APBN</li> <li>- Optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD), terutama pada komoditas pemicu inflasi.</li> <li>- Meningkatkan penerapan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk antisipasi gagal panen dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)</li> <li>- Meningkatkan peran perbankan untuk mendukung program ketahanan pangan melalui kredit ketahanan pangan dan energi.</li> <li>- Pemetaan kondisi irigasi untuk respons cepat apabila terdapat keterbatasan pasokan air</li> <li>- Mendorong percepatan pembangunan pasar induk untuk ketersediaan stok</li> </ul>
------------------------------------	--

<b>Kelancaran Distrbusi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan arus barang masuk dan barang keluar dari Bali</li> <li>- Rehabilitasi jalan penghubung wilayah kab/kota</li> <li>- Pemanfaatan perdagangan digital (e-commerce)</li> <li>- Menyediakan alokasi subsidi ongkos angkut yang dapat dimanfaatkan oleh Perumda maupun lembaga pangan lain (seperti Bumdes, Koperasi, Bulog).</li> <li>- Mendorong akselerasi pembentukan pasar induk di Bali untuk kelancaran distribusi komoditas pangan</li> </ul>
<b>Komunikasi Efektif</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan High Level Meeting, Rapat Koordinasi TPID Provinsi, Rapat Monev TPID secara berkala atau insidentil</li> <li>- Pelaksanaan capacity building</li> <li>- Pemberian penghargaan bagi TPID Kab/Kota se-Bali</li> <li>- Melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi melalui berbagai media.</li> <li>- Penyebarluasan hasil pemantauan harga dan neraca pangan melalui aplikasi SiGapura</li> <li>- Publikasi harga setiap hari melalui berbagai media salah satunya Bali Media Center (BMC).</li> <li>- Menghimbau distributor pangan utama di Bali untuk menjaga margin yang wajar dan tidak menimbun pangan.</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program gerakan tanam cepat panen (GENTA PATEN) di lingkungan rumah tangga, sekolah, dan perkantoran</li> <li>- himbauan belanja bijak</li> </ul>

#### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- a. Pemerintah Provinsi Bali telah membuat kebijakan inovatif berupa Surat Edaran Pj. Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2024 tentang Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen Mendukung Pengendalian Inflasi Provinsi Bali. Hal ini sudah ditindaklanjuti secara konkrit dengan melaksanakan Genta Paten Cabai di seluruh PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan juga melaksanakan Genta Paten Jagung sebagai pilot project adalah lahan yang ada di Kantor Gubernur Bali. Biro PBJEK juga sudah melaporkan
- b. TPID Provinsi Bali telah melaksanakan koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID kabupaten/kota seProvinsi Bali melalui zoom meeting dan pertemuan secara langsung. Kegiatan ini dilakukan secara berkala yaitu rakor inflasi mingguan oleh Kemendagri dan secara insidentil dilakukan koordinasi antara TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. TPID Provinsi telah melakukan tagging anggaran terhadap pengendalian inflasi di tahun 2024 sebesar Rp.123.812.775.240,- dan setiap bulan dilihat realisasi dari penganggaran dimaksud. Jika dibandingkan dengan anggaran inflasi tahun 2023 yaitu sebesar

Rp.122.107.547.177,- maka anggaran inflasi tahun 2024 mengalami kenaikan.

- d. Pemerintah Provinsi Bali telah membangun sistem/mekanisme pemantauan perkembangan harga komoditas serta analisis ketersediaan dan kebutuhan komoditas melalui kegiatan pemantauan harga dan pasokan pangan pokok strategis melalui aplikasi SiGapura. Disamping itu aplikasi SiGapura juga memiliki fitur untuk menayangkan neraca pangan untuk 20 komoditas penting dalam inflasi. Bersama dengan Diskominfos telah dilakukan penambahan-penambahan fitur pada aplikasi SiGapura khususnya terkait dengan pelaporan mingguan kepada pimpinan sehingga data lebih mudah diakses. Pelaporan dimaksud adalah Data perkembangan harga selama seminggu dan data neraca pangan secara agregat.
- e. Pembangunan pasar induk yang diawali dengan studi kelayakan pasar induk sudah mulai dilaksanakan oleh LPPM UNUD. Dimulai dengan melakukan studi banding ke pasar induk yang ada di Jawa Timur baik itu pasar induk milik Pemerintah atau Swasta. Kemudian telah disusun preliminary studi kelayakan Pasar Induk. Namun belum final dan membutuhkan FGD dari stakeholder untuk menyempurnakan pelaporan.
- f. Pemantauan harga dan pasokan bahan pokok penting telah dilakukan secara berkala oleh Perangkat Daerah terkait seperti Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM dan Dinas Perikanan dan Kelautan. Adapun sasaran yang dipantau adalah pasar, distributor pangan, agen dan pangkalan gas LPG 3 kg, penyosohan, horeka, dll
- g. Daging babi menjadi komoditas yang mengalami tren kenaikan harga pada triwulan II tahun 2024 sehingga perlu ada upaya-upaya (intervensi) dari segi penyediaan komoditas dan pendistribusian. Sementara cabai rawit dan bawang merah pergerakannya fluktuatif. Provinsi dan Kabupaten/Kota secara intensif melakukan operasi pasar/pasar murah khususnya bagi komoditas-komoditas yang bergejolak.
- h. Per 1 Mei 2024 terjadi kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada beras SPHP dari 10.900/kg menjadi 12.500/kg yang merupakan aturan terbaru Bapanas. Pemerintah Provinsi Bali berkoordinasi dengan Bulog tetap optimis menyalurkan beras SPHP ke masyarakat.
- i. Pelaksanaan Cadangan Beras Pemerintah Provinsi masih dalam proses pengadaan dimana rencana awal mengajak Perumda Pangan Provinsi Bali untuk dikelola sehingga dapat meningkatkan peran Perumda dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan
- j. Belum maksimalnya pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan wilayah surplus baik di Bali maupun luar Bali untuk ketersediaan pasokan bahan pangan baik dilakukan oleh PD maupun Perumda Pangan.

#### 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi diatas beberapa rekomendasi kebijakan pengendalian Inflasi Pemerintah Provinsi Bali secara rinci yaitu meliputi:

- a. Pemerintah Provinsi Bali agar tetap mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pasar murah secara konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat khususnya untuk harga komoditas kebutuhan pokok strategis yang mengalami tren kenaikan pada TW II 2024 yaitu daging babi, beras, cabai rawit dan bawang merah. Kegiatan pasar murah dapat dilakukan oleh beberapa PD terkait dan bekerjasama dengan Bulog, BI dan BPD Bali. Hal ini terlihat, dimana pada bulan Juni 2025 Provinsi Bali tercatat mengalami deflasi sebesar 0,55 persen. Sementara secara year to date (y-t-d), tercatat inflasi sebesar 1,12 persen.
- b. Mendorong Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan wilayah surplus baik di Bali maupun

luar Bali untuk ketersediaan pasokan bahan pangan baik dilakukan oleh PD maupun Perumda Pangan. Mendorong Paiketan Perumda Pangan se-Bali untuk melaksanakan langkah-langkah konkrit pengendalian inflasi dan Pemprov. Bali agar dapat memfasilitasi kegiatan paiketan perumda pangan dimaksud.

- c. Mendorong optimalisasi aplikasi SiGapura terkait pengolahan data dan analisis sehingga dapat membantu pimpinan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang tepat dalam pengendalian inflasi.
- d. Mendorong percepatan proses pengadaan untuk cadangan beras Pemerintah Provinsi sehingga mempercepat dan mempermudah akses pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan krisis pangan dan dapat menyiapkan bantuan bagi masyarakat rawan pangan, masyarakat miskin atau daerah lain yang membutuhkan.
- e. Meningkatkan penyaluran beras SPHP ke masyarakat dan jagung SPHP ke peternak, yang didukung dengan peningkatan ketersediaan stok melalui optimalisasi hasil panen.
- f. Melaksanakan sidak harga pasar dan pemantauan distribusi bahan pangan pokok secara berkala khususnya pmenjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dengan menggandeng Satgas Pangan Provinsi Bali. Hal ini perlu dilakukan mencegah para spekulan bermain di lapangan.
- g. Mendorong pelaksanaan Genta Paten dengan berbagai sasaran selain Perangkat Daerah. Genta Paten dapat dilakukan di sekolah-sekolah dan memanfaatkan lahan kosong yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali. Lahan kosong dimaksud dapat dikelola oleh gapoktan dengan bibit cabai diperoleh dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.